

ANALISIS EFISIENSI KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN JEMBRANA

Putri Anggreni¹⁾, Vina Budi Agustiani²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta

email: gek cay@gmail.com

Abstract: Cooperatives are economic institutions of the people who move the economy in promoting the welfare of the people of society. The main purpose of this study is to determine the level of efficiency and performance and cooperation of civil servants existing in Jembrana district. Data used in this research is secondary data obtained from PKPRI. KPRI population in Jembrana, while the number of samples used is 5 KPRI taken by simple random sampling. The research method used is Data Envelopment Analysis (DEA). Capital cost, management, number of managers as variable input, whereas Sisa Hasil Usaha (SHU) as output variables. Results of analysis states that KPRI-KPRI cause of these inefficiencies derived from inputs that do not conform with the needs/going waste. Cost management becomes the biggest cause of inefficiency in the cooperative that is equal to 2,65 %, followed by the number of managers amounted to 0,81% and 0,81% of capital. There were 1 of 5 KPRI KPRI samples were low, There were 1 of 5 KPRI samples that have not been efficient, there are: Shad Karya KPRI: 95,93%. Suggestion for KPRI is not efficient should pay more attention to the use of inputs in order to achieve maximum output, especially the allocation of operational costs so that more attention, use of employees' needs and improve its work, and reduce the use of funds derived from loans and optimize the rotation of capital and refers to other KPRI has achieved efficiently.

Keywords: Cooperation, Efficiency, DEA.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia semenjak jaman kemerdekaan selalu dilandaskan pada asas demokrasi dimana rakyat ikut berpartisipasi. Perekonomian di Indonesia dilandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selama ini lembaga yang melibatkan rakyat kecil adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan masyarakat. Selain itu koperasi merupakan salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi selain BUMN dan swasta. Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada kepentingan materi atau ekonomi. Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem

ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali asal sistem pengelolaannya benar dan tertib tanpa kecurangan. (Hariyono, 2003).

Koperasi sebagai lembaga keuangan, dalam kegiatan usahanya sangat diperlukan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kredit, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Koperasi jenis ini biasanya menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha

lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya karena hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Selain itu, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota atau juga bukan anggota dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat pelayanan yang lebih tinggi jika dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit.

Koperasi juga telah menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Saat kondisi perbankan menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada di koperasi ke bank. Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan koperasi telah berjalan lama, telah diketahui kemampuannya melayani, merupakan organisasi milik anggota, dan ketidakpastian dari daya tarik bunga bank.

Pada masa yang akan datang, masyarakat masih membutuhkan layanan usaha koperasi. Alasan utama kebutuhan tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep

pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan penawaran, peningkatan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan pengolahan, pemasaran, dan sebagainya dari kegiatan anggota. Alasan lain adalah karena adanya peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu yang tidak berkaitan dengan usaha anggota atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak pemerintah yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan selama ini (Krisnamurthi, 2002).

Koperasi merupakan salah satu lembaga wujud ideal organisasi ekonomi rakyat. Dalam pelaksanaan koperasi memiliki kebijakan dan prinsip tersendiri yaitu kekeluargaan dan gotong royong sesuai dalam pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan rakyat miskin dan lemah. Seringkali dalam masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam permodalan usaha. Namun saat ini pemerintah sudah berusaha memberi kemudahan dalam kredit tetapi, masih banyak kendala yang dialami masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan kredit usaha di bank. Hal ini dikarenakan oleh adanya aturan-aturan dalam sistem perbankan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kalangan bawah. Koperasi di Indonesia lahir secara alami dari masyarakat pada waktu zaman penjajahan. Perkembangan koperasi mulai pesat setelah era kemerdekaan. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan kemajuan zaman. Pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam (Sitio dan Tamba, 2001), kemudian tumbuh koperasi-koperasi lain yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-

barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju pada bentuk koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha. Keragaman jenis koperasi ini dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi. Selain itu terbentuknya jenis koperasi juga dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian anggota, misalnya KPRI, koperasi karyawan, koperasi nelayan.

KPRI merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri yang memiliki pendapatan tetap dan relatif rendah. KPRI didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup pegawai negeri. Selain untuk kesejahteraan pegawai negeri, KPRI didirikan untuk menyukseskan program pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UKM. KPRI juga dapat dijadikan sebagai suatu wadah bagi Pegawai Negeri yang ingin mengembangkan potensi kewirausahaan yang mereka miliki. Dengan adanya KPRI diharapkan dapat membantu pegawai negeri dalam meningkatkan taraf hidup pegawai negeri baik berupa kredit pinjaman modal, kredit konsumsi, tabungan dan sebagainya.

Koperasi dalam melakukan usahanya menekankan pada efisiensi usaha dan manajemen koperasi yang secara tidak langsung tampak dari meningkatnya sistem manajemen dalam koperasi (Swasono, 1983). Demikian juga halnya dengan KPRI. Di dalam KPRI diperlukan efisiensi agar tujuan dari KPRI dapat tercapai. Sebagai suatu badan usaha, KPRI harus senantiasa memperhatikan kebijakan penggunaan modal dalam perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi hasil operasi. Keberhasilan kebijakan penggunaan modal ini dapat dilihat dari rentabilitas perusahaan. Rentabilitas merupakan kriteria kemampuan hasil operasi perusahaan-perusahaan yang bermanfaat untuk: 1) Menilai keberhasilan

suatu perusahaan dalam operasinya; 2) Menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan; 3) Alat pembandingan pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal.

Tingkat rentabilitas sangat penting bagi perusahaan, sebab rentabilitas mencerminkan kemampuan modal perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat rentabilitas suatu perusahaan berarti semakin tinggi atau naik pula tingkat efisiensi penggunaan modalnya. Di dalam koperasi, tingkat rentabilitas ditentukan oleh Sisa Hasil Usaha yang diperoleh. Semakin tinggi SHU maka pendapatan yang akan diperoleh anggota semakin tinggi. Dengan demikian kesejahteraan anggota dapat tercapai.

Efisiensi di dalam kelembagaan koperasi sangat diperlukan demi tercapainya tujuan koperasi yaitu menyejahterakan anggota koperasi, khususnya koperasi pegawai negeri dimana koperasi pegawai negeri merupakan koperasi yang tergolong solid dan banyak dijumpai di tiap-tiap instansi pemerintah. Berdasarkan uraian yang ada dapat kita tarik beberapa permasalahan dalam Koperasi Pegawai Negeri di Kabupaten Jember. Adapun beberapa permasalahan yang dapat terjadi antara lain: 1) Bagaimana tingkat efisiensi koperasi pegawai negeri yang ada di Kabupaten Jember? 2) Apa yang menjadi sumber penyebab inefisiensi pada koperasi pegawai negeri di Kabupaten Jember dan bagaimana cara mengatasinya?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja koperasi pegawai negeri yang ada di Kabupaten Jember; 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber penyebab ketidakefisienan pada koperasi pegawai negeri dan cara mengatasinya.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Koperasi adalah suatu kumpulan

orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama, maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarang bentuk kerja sama seperti itu. Yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula (Baswir, 1997).

Dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan: "...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: "...badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Masalah efisiensi merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Efisiensi tidak terlepas dari prinsip dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu dengan faktor produksi yang terbatas bagaimana dapat menghasilkan produk semaksimal mungkin, atau untuk menghasilkan output tertentu bagaimana faktor produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk menghasilkan

output. Sedangkan efektifitas merupakan karakteristik lain dari proses yang mengukur derajat pencapaian output dari sistem produksi. Efektifitas diukur berdasarkan rasio output aktual terhadap output yang direncanakan.

Beberapa macam cara untuk mengukur/membandingkan tingkatan efisiensi antar perusahaan yaitu: 1) efisiensi teknis, dua perusahaan mempunyai tingkatan efisiensi teknis yang berbeda jika pada tingkat penggunaan input yang sama, output yang dihasilkan berbeda. Efisiensi teknis mengukur keberhasilan suatu kegiatan ekonomi dalam memproduksi output maksimal dari kombinasi input tertentu, pada umumnya input yang dipergunakan dalam proses produksi bisa digambarkan dengan mempergunakan kurva *isoquant*, fungsi produksi (*production function*), fungsi biaya (*cost function*), dan fungsi keuntungan (*profit function*); 2) efisiensi alokatif (efisiensi harga) dua perusahaan mempunyai kesanggupan yang berbeda dalam hal menyamakan nilai produk marginal (*marginal value product*) dari input peubah terhadap harga oportunitas sehingga gagal memaksimalkan harga. Efisiensi alokatif mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengalokasikan input dalam mencapai keuntungan maksimum; 3) efisiensi ekonomi, dua perusahaan mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda walaupun keduanya beroperasi pada kondisi pasar faktor produksi atau pasar produk yang sama tapi mungkin masing-masing mendapat perlakuan harga yang berbeda, atau dapat dikatakan bahwa efisiensi ekonomi merupakan gabungan dari efisiensi teknis dan efisiensi alokatif.

Salah satu cara untuk mengukur efisiensi secara teknis adalah menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Menurut Susila dan Isa, (2009), data merupakan ukuran efisiensi relatif, baik antar organisasi yang berorientasi laba maupun tidak, yang mengukur inefisiensi unit-unit usaha yang dibandingkan dengan unit lain yang dianggap paling efisien dalam set data yang ada. Dalam analisis

DEA, dimungkinkan beberapa unit mempunyai tingkat efisiensi 100% yang artinya bahwa unit tersebut merupakan unit yang terefisien dalam set data tertentu dan waktu tertentu.

Pengukuran efisiensi dari sebuah produksi dapat dilihat dari rasio antara input dan output. Fungsi produksi yang digunakan mempunyai 1 output dan 3 input. Output diukur dari besarnya SHU sedangkan input yang diukur adalah modal, biaya pengelolaan, dan jumlah pengelola. Dalam penelitian KPRI ini mengacu pada efisiensi koperasi yang berorientasi pada efisiensi pengelolaan usaha. Dalam pengukuran efisiensi koperasi pegawai negeri digunakan metode non parametric yaitu dengan *DEA (Data Envelopment Analysis)*. Dengan menggunakan *DEA*, tingkat efisiensi KPRI dapat diukur dengan membandingkan antara KPRI yang satu dengan KPRI lainnya yang ada di kabupaten Jembrana.

Acuan/standar efisiensi yang ditentukan oleh *DEA* adalah suatu nilai yang relatif sehingga dalam penilaiannya menggunakan persentase. Para ahli metodologi tidak menemukan kesepakatan sehingga penulis hanya memperbesar tingkat akurasi metode pengolahan dengan menggunakan perhitungan *DEA* dengan prinsip efisiensi = 100 % dan < 100 % inefisiensi. Hipotesa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Diduga bahwa KPRI di Kabupaten Jembrana kurang efisien dengan target efisiensi <1 atau <100%; 2) Diduga bahwa variabel input seperti modal, biaya pengelolaan, dan jumlah pengelola, serta variabel output Sisa Hasil Usaha merupakan sumber dari penyebab efisiensi/inefisiensi dalam KPRI.

METODE PENELITIAN

Modal koperasi merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pegawai negeri. Modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Dinyatakan dengan satuan rupiah. Jumlah pengelola adalah jumlah tenaga kerja yang

mengelola usaha koperasi. Pengelola koperasi terdiri dari pengurus dan karyawan dari luar anggota. Dinyatakan dalam satuan orang. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi pegawai negeri. Dinyatakan dalam satuan rupiah. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan laba yang dihasilkan dari produksi koperasi. SHU merupakan selisih antara seluruh pemasukan atau penerimaan koperasi secara total dengan seluruh biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Rasio ini menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk menghasilkan output.

Sampel menurut Sugiyono (2009) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sedangkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Jadi sampel yang digunakan adalah sampel *random sederhana (Simple Random Sampling)* yaitu sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata (jenjang), hal ini dikarenakan karakteristik dari populasi yang homogen. Elemen populasi berpeluang sama untuk menjadi elemen sampel.

Metode sampel ini digunakan jika populasi dianggap homogen karena yang diteliti adalah Koperasi Pegawai Negeri yang anggotanya adalah para PNS. Jadi hanya 1 jenis profesi, sehingga penggunaan sampel *random sederhana* penulis menganggapnya tepat. Pelaksanaan penentuan jumlah sampel bersifat proporsional, jadi jumlah sampel yang dipakai sudah ditentukan sebelumnya. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 27 KPRI di Kabupaten Jembrana. KPRI yang dipakai adalah KPRI yang masih aktif. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 5 KPRI. Sumber data berupa jumlah modal, jumlah pengelola, biaya pengelolaan dan jumlah SHU yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dari Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Jember tahun 2018. Sedangkan data pendukung berupa jumlah penduduk, PDRB dan jumlah populasi koperasi diperoleh dari Dinas Koperasi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Kabupaten Jember.

Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik *Data Envelopment Analysis* (DEA). Teknik *DEA* adalah sebuah teknik pemrograman matematis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari sebuah kumpulan unit-unit pembuat keputusan (*Decision Making Unit/DMU*) dalam mengelola sumber-sumber daya (input) dengan jenis yang sama menjadi hasil (output) dengan jenis yang sama pula, dimana hubungan fungsi dari input ke output tidak diketahui.

Metode ini digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Input dan output yang digunakan dalam penelitian ini dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Metode ini sesuai untuk mengukur efisiensi relatif dari koperasi

mengingat operasional koperasi melibatkan banyak input dan menghasilkan output. *DEA* membandingkan output dan input dari unit yang diobservasi terhadap unit dari suatu organisasi, yang selanjutnya dapat menentukan unit yang relatif efisien sebagai *best practice* yang menjadi acuan bagi unit yang belum efisien. Metode ini sesuai untuk menganalisis efisiensi koperasi. *DEA* menghitung efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor efisiensi untuk setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya dari sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan lima (5) koperasi pegawai negeri tahun 2018. Dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak. Data-data yang diambil berdasarkan variabel yang akan digunakan dalam pengukuran antara lain: 1) Variabel input (modal koperasi, biaya operasional, jumlah pengelola); 2) Variabel output (SHU).

Data-data yang akan digunakan dalam menganalisis efisiensi usaha KPRI tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Modal, Biaya Pengelolaan, Jumlah Pengelola, SHU KPRI Tahun 2018

Nama Koperasi	Modal Usaha (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Jumlah Pengelola (orang)	SHU (Rp)
KPRI Shad Karya	4.102.308.617,31	505.888.951,00	7	138.003.372,00
KPN Setia Kawan	4.109.803.656,00	574.525.209,00	11	208.155.718,00
KPRI Eka Cita	20.122.366.821,00	1.693.147.843,00	13	1.427.122.469,00
KPN Setia Graha	3.430.264.753,00	340.105.804,00	6	223.914.283,00
KPN Setia Kencana	2.299.049.495,14	337.303.202,35	3	56.836.274,70

Sumber: KPRI Kabupaten Jember (Laporan RAT 2019)

Hasil analisis data dengan menggunakan model *DEA* yang diproses dengan menggunakan *software DEAP*

Version 2.1, maka diperoleh tingkat efisiensi dari kelima (5) KPRI seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Efisiensi KPRI Jembrana Tahun 2018

No	Nama Koperasi	Efisiensi
1	KPRI Shad Karya	95.59%
2	KPN Setia Kawan	100.00%
3	KPRI Eka Cita	100.00%
4	KPN Setya Graha	100.00%
5	KPN Setia Kencana	100.00%

Sumber: Hasil Olahan *DEA*.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat satu (1) KPRI yang belum efisien. KPRI yang belum efisien adalah KPRI Shad Karya: 95,59%. Setelah *DEA* menunjukkan tingkat efisiensi untuk masing-masing KPRI dengan memberi angka 1 atau 100% untuk koperasi yang sudah efisien dan kurang dari 1

atau 100% untuk koperasi yang belum efisien. Karena terdapat satu koperasi yang belum efisien, maka perlu dilakukan kebijakan apa saja yang perlu diambil agar KPRI menjadi efisien. Disini *DEA* akan memberikan solusi bagi koperasi yang belum efisien.

Tabel 3. Peers Bagi Koperasi Yang Tidak Efisien

No	Nama Koperasi	Peers1	Peers2	Peers3
1	KPRI Shad Karya (SHK)	0,474 (SKe)	0,427 (SeK)	0,099 (SeG)

Sumber: Hasil Olahan *DEA*

Keterangan: SHK = KPN Shad Karya
SeK = KPN Setia Kawan
SeG = KPN Setya Graha
SKe = KPN Setia Kencana

Tabel 4. Rata-Rata Efisiensi Variabel

NO	UKE	INPUT			OUTPUT
		MDL (%)	BP (%)	JP (%)	SHU
1	KPRI Shad Karya	95.93	86.77	95.93	100.00
2	KPN Setia Kawan	100.00	100.00	100.00	100.00
3	KPRI Eka Cita	100.00	100.00	100.00	100.00
4	KPN Setya Graha	100.00	100.00	100.00	100.00
5	KPN Setia Kencana	100.00	100.00	100.00	100.00
	RATA-RATA	99.19	97.35	99.19	100.00

Sumber : Hasil Olahan *DEA*

Keterangan : MDL = Modal
BP = Biaya Pengelolaan
JP = Jumlah Pengelola
SHU = Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah efisiensi terendah terletak pada input yaitu biaya pengelolaan sebesar 97,35%. Hal ini

dikarenakan biaya pengelolaan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah SHU yang didapat oleh koperasi atau terjadi pemborosan dan penggunaan jumlah pengelola

yang perlu dikurangi. Modal efisiensinya mencapai 99,19%, hal ini juga berarti bahwa modal yang didapat koperasi digunakan kurang

baik. Sedangkan efisiensi terbesar terletak pada SHU yaitu sebesar 100%.

Tabel 5. Rata-Rata Inefisiensi Variabel

NO	UKE	INPUT			OUTPUT
		MDL (%)	BP (%)	JP (%)	SHU
1	KPRI Shad Karya	4.07	13.23	4.07	0.00
2	KPN Setia Kawan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	KPRI Eka Cita	0.00	0.00	0.00	0.00
4	KPN Setia Graha	0.00	0.00	0.00	0.00
5	KPN Setia Kencana	0.00	0.00	0.00	0.00
	RATA-RATA	0.81	2.65	0.81	0.00

Sumber: Hasil Olahan *DEA*

Keterangan: MDL = Modal

BP = Biaya Pengelolaan

JP = Jumlah Pengelola

SHU = Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata inefisiensi tertinggi terletak pada input yaitu biaya pengelolaan sebesar 2,65%. Inefisiensi ini terjadi karena biaya pengelolaan yang dikeluarkan terlalu besar jika dibanding dengan jumlah SHU yang didapat oleh koperasi atau terjadi pemborosan dan penggunaan jumlah pengelola yang perlu dikurangi. Inefisiensi pada modal juga mencapai 0,81%. Hal ini juga berarti bahwa modal yang didapat koperasi tidak digunakan secara baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam meneliti efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)* menunjukkan bahwa tidak semua KPRI efisien secara teknis. Diantara 5 (lima) KPRI terdapat 1 (satu) KPRI yang belum mencapai efisien secara teknis yaitu KPRI Shad Karya. Sedangkan KPN Setia Kawan, KPRI Eka

Cita, KPN Setia Graha dan KPN Setia Kencana telah mencapai efisiensi secara teknis.

2. Efisiensi koperasi terbesar terletak pada variabel output, yaitu SHU sebesar 100%. Sedangkan variabel input modal tingkat efisiensi rata-ratanya 99,19%, biaya pengelolaan 97,35%, dan jumlah pengelola 99,19%.
3. Sumber inefisiensi koperasi terbesar terletak pada variabel input yaitu biaya pengelolaan 2,65%, jumlah pengelola 0,81% dan modal 0,81%.
4. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI Shad Karya bersumber pada masing-masing input adalah modal tingkat efisiensinya 95,93%, biaya pengelolaan efisiensinya 86,77%, sedangkan efisiensi dalam jumlah pengelola mencapai 95,93%. Inefisiensi ini dapat dilihat dari nilai *actual* yang belum sama dengan nilai *targetnya*. Disamping itu juga dapat dilihat dari nilai *achieved* dari KPRI Shad Karya belum mencapai 100%.
5. Uji hipotesis menunjukkan Inefisiensi koperasi Shad Karya yang inputnya besar tapi outputnya tidak berimbang karena

dilihat dari jumlah pengelola dan biaya pengelolaan, bukan dari modal karena besar kecilnya modal relatif semua tergantung dari jumlah pengelola dan biaya operasional.

6. *Data Envelopment Analysis (DEA)* menawarkan alternatif kebijakan yang dapat diambil dalam mencapai efisiensi. Alternatif kebijakan yang dapat diambil antara lain:
 - a. Alternatif pertama yang dapat diambil dalam mencapai efisiensi adalah dengan berorientasi pada input (*input oriented*) maksudnya adalah dengan memperbaiki jumlah input yang digunakan untuk mencapai output efisien secara *actual*-nya.
 - b. Alternatif kedua yang dapat diambil dalam mencapai efisiensi adalah dengan mengacu pada KPRI lain yang telah mencapai efisiensi. *DEA* memberikan petunjuk dalam menentukan kantor cabang yang dijadikan acuan yaitu dari hasil *peers*.

Saran

Dari hasil penelitian ini maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPRI yang mencapai efisien hendaknya lebih meningkatkan efisiensinya atau minimal mempertahankan efisiensi yang telah dicapai dengan meningkatkan produktifitasnya.
2. Bagi KPRI yang belum efisien agar dapat efisiensi, dapat dilakukan cara-cara antara lain:
 - a. Mengurangi pemborosan dari sisi input, yaitu:
 - 1) Biaya pengelolaan: mengurangi pemborosan atau melakukan penghematan pengeluaran operasional misalnya pembelanjaan barang yang tidak perlu.
 - 2) Jumlah pengelola: menggunakan karyawan sesuai kebutuhan dan meningkatkan kinerja pengelola.

- 3) Modal: mengurangi penggunaan modal yang berasal dari luar anggota, misalnya pinjaman dari bank sehingga berusaha mengoptimalkan perputaran modal yang ada.

- b. Mengacu pada KPRI lain yang telah efisien. Dapat dilihat dari hasil *peers* yang telah ada.

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel pelayanan dan tingkat bunga pinjaman koperasi sebagai bagian dari variabel output, sebab kesuksesan suatu koperasi tidak hanya bersumber dari besarnya SHU semata, akan tetapi dari sisi pelayanan juga dibutuhkan demi kesejahteraan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. 1997. *Koperasi Indonesia* Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Hariyono. 2003. Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila. Artikel Th. II No. 4. <http://www.ekonomirakyat.org>. Didownload pada tanggal 11 Pebruari 2021.
- Krisnamurthi, B. 2002. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan ekonomi Rakyat. Artikel Th. I No. 4. <http://www.ekonomirakyat.org>. Didownload pada tanggal 11 Pebruari 2021.
- Sitio, A., & Tamba, H. 2001. *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Susila, I., & Isa, M. 2009. Pengukuran Efisiensi Teknis Usaha Mebel Dengan Data Envelopment Analysis (DEA). *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. 11 (1): 19 - 29.

Swasono. 1983. *Koperasi Di Dalam Orde
Ekonomi Indonesia*. Penerbit Universitas
Indonesia. Jakarta.